

PEMERINTAH, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT: STUDI TENTANG KONFLIK SOSIAL BUDAYA DI BUNTU BATU ENREKANG

Mirnawati

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
email: mirnawati190695@gmail.com

Abstract

This research was conducted to find out: (1) What are the considerations of the Regional Government to make Lunjen Village a mining area. (2) What is the background of the PT Arung Bungin conflict in Lunjen Village, Buntu Batu District. (3) What is the socio-cultural impact of the conflict in the development of PT Arung Bungin in Lunjen Village, Buntu Batu District. To achieve these objectives, the researcher uses data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data obtained from the results of the study were processed using descriptive qualitative research methods. The results showed that (1) the consideration of the local government to make Lunjen Village a mining area, the strong foundation of the local government regarding site selection due to several factors, namely the economic impact that would help Enrekang District's Original Revenue increase, open employment opportunities for local communities. (2) The background of the PT Arung Bungin conflict in Lunjen Village, Buntu Batu Subdistrict, the trigger of the conflict in Lunjen Village because the Lunjen Community considers that the entry of PT Arung Bungin in the Lunjen Village area to carry out mining exploration is not in accordance with applicable procedures. (3) The socio-cultural impact of the conflict in the development of PT Arung Bungin in Lunjen Village, Buntu Batu District, the Lunjen Village Community still adheres to the TOBANA Culture (Please help help advise advice). As a result of the construction of a mine by PT Arung Bungin which triggered conflict in the Lunjen community, the TOBANA culture in some of the Lunjen communities began to appear tenuous with each other.

Keywords: Conflict, Local Government, PT Arung Bungin, community

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Bagaimana pertimbangan Pemerintah Daerah sehingga menjadikan Desa Lunjen sebagai kawasan pertambangan. (2) Bagaimana latar belakang terjadinya konflik PT Arung Bungin di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu. (3) Bagaimana dampak sosial budaya akibat adanya konflik pembangunan PT Arung Bungin di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan pemerintah daerah untuk menjadikan Desa Lunjen sebagai kawasan pertambangan, landasan kuat pemerintah daerah terkait pemilihan lokasi dikarenakan beberapa faktor yaitu dampak ekonomi yang akan membantu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang meningkat, membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. (2) Latar belakang terjadinya konflik PT Arung Bungin di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu, pemicu terjadinya konflik di Desa Lunjen karena Masyarakat Lunjen menganggap bahwa masuknya PT Arung Bungin di wilayah Desa Lunjen untuk melakukan eksplorasi tambang tidak sesuai prosedur aturan yang berlaku. (3) Dampak sosial budaya akibat adanya konflik pembangunan PT Arung Bungin di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu, Masyarakat Desa Lunjen masih memegang teguh Budaya TOBANA (Tolong menolong bantu membantu nasehat menasehati). Akibat adanya pembangunan tambang yang dilakukan PT Arung Bungin yang menjadi pemicu timbulnya konflik di masyarakat Lunjen sehingga Budaya TOBANA di sebagian masyarakat Lunjen mulai nampak renggang antara satu dengan yang lainnya.

A. Pendahuluan

Pertambangan bukanlah hal yang baru lagi, pada dasarnya Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, sejak kedatangan kolonial Belanda kekayaan Indonesia khususnya sumber daya alam berupa pertambangan terus digerus untuk memperkaya bangsa asing dan memberi kesengsaraan pada masyarakat Indonesia terutama yang bermukim di area tambang. Pertambangan merupakan sesuatu kegiatan yang bergerak pada proses penggalian yang dimiliki oleh pengusaha tambang dengan tujuan mendapatkan barang tambang dan keuntungan dari hasil tambang. Sebagaimana diketahui secara luas, bahwa pertambangan dilakukan di Indonesia atas persetujuan atau kebijakan, pertambangan adalah usaha yang legal sejauh dilandasi oleh peraturan perundangan.(Nalle, 2012)

Pembangunan pertambangan dewasa ini sering kali memicu timbulnya konflik yang berkepanjangan antara pemerintah sebagai bagian dari pembangunan tersebut dengan masyarakat di area pembangunan. Konflik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia baik itu konflik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Konflik dapat terjadi di manasaja, kapansaja, dan oleh siapa saja, baik bersifat vertikal ataupun horizontal. Konflik dapat terjadi antara individu dengan individu. Kelompok dengan kelompok, maupun Negara dengan Negara.

Masalah konflik pertambangan merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menjadi perhatian publik karena

wujudnya yang sebagian besar tidak mengarah pada suatu kekerasan sosial. Di sisi lain, adanya konflik juga memiliki dampak bagi masyarakat. Jika konflik tidak dikelola dengan baik maka akan menyebabkan dampak negatif berupa timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non-fisik, ketidakamanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, bahkan sampai mengakibatkan korban jiwa. (Ahmadin, n.d.; Belanda et al., n.d.; Pelzer, 1957; Rahman, n.d.; Zuber, 2016)

Konflik pertambangan yang baru-baru ini terjadi adalah di Enrekang tepatnya di Desa Lunjen. Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu merupakan daerah yang maju dan berkembang. Sebab wilayah ini memiliki berbagai sumber daya alam yang bisa diandalkan. Desa Lunjen merupakan salah satu desa paling luas perkebunannya diantara desa yang ada di Kecamatan Buntu Batu sehingga akan menjadi desa dengan luas perkebunan yang paling luas akan terkena dampaknya dengan pembangunan tambang tersebut karena Desa Lunjen merupakan lokasi pembangunan tambang marmer tersebut. Perencanaan pembangunan tambang ini merupakan hal yang baru bagi masyarakat di Desa Lunjen kecamatan Buntu Batu. Sebab karena ini merupakan pertama kali dibangun sebuah perusahaan tambang di Enrekang khususnya di Desa Lunjen, masyarakat Lunjen mayoritas bermatapencaharian sebagai petani sehingga dengan didirikan tambang muncul kekhawatiran masyarakat mengenai pencemaran lingkungan. Konflik di daerah tersebut merupakan konflik yang bentuknya vertikal. Konflik ini terjadi di Kantor Bupati Enrekang yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat melawan pemerintah terkait

kebijakan pembangunan perusahaan tambang PT Arung Bungin.

Konflik ini berawal dari penolakan masyarakat setempat terhadap pembangunan pertambangan. Salah satunya adalah penolakan dari masyarakat Desa Lunjen pada pembangunan PT Arung Bungin. Penyebab utama karena pada wilayah pembangunan tersebut terdapat peninggalan pra-sejarah berupa tapak tangan dan makam raja-raja duri, yang mana masyarakat tidak ingin merusak cagar budaya tersebut. Selain itu, masyarakat merasa takut setelah lahan tersebut dibangun pertambangan maka akan menjadi tandus dan akan menyebabkan terjadinya bencana alam.

Di sisi lain, asumsi bahwa kehadiran perusahaan tambang disuatu daerah akan membawa kemajuan terhadap warga di sekitarnya. Namun faktanya sekarang ini dapat dilihat bahwa pemerintah lebih banyak melibatkan tenaga kerja asing dibanding dengan tenaga kerja lokal. Oleh sebab itu, masyarakat khawatir apabila pembangunan tersebut dilanjutkan bukan hanya cagar budaya rusak melainkan masyarakat sekitar akan mengalami kerugian dan lebih menguntungkan dan mensejahterakan tenaga kerja asing. Selain itu, tidak ada informasi awal dari pemerintah terkait bentuk kegiatan dari perusahaan itu dan manfaat yang akan diterima warga dan lainnya. Bentuk dari protes masyarakat pertama kali yang dilakukan adalah dengan melakukan aksi demo yang berujung pada bentrok serta pengrusakan sarana pemerintah dan pembakaran peralatan bangunan PT Arung Bungin oleh masyarakat. Tidak hanya itu saja masyarakat juga melakukan pemasangan baliho di sepanjang jalan yang berisikan penolakan terhadap pembangunan tambang.

Konflik yang terjadi pada PT Arung Bungin tak lepas dari pro dan kontra oleh

masyarakat. Bagi masyarakat yang setuju dengan adanya PT Arung Bungin memandang bahwa pembangunan tambang tersebut membawa keuntungan terhadap masyarakat sekitar seperti ketersediaan lapangan kerja di sisilain pada masyarakat yang tanahnya dijadikan jalan untuk dilalui alat berat seperti ekskavator diganti rugi berupa uang. Bagi pihak yang tidak setuju, menganggap bahwa pembangunan PT Arung Bungin akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan rusaknya cagar budaya.

Konflik rencana penambangan marmer di wilayah lahan lindung yang terdapat di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang sampai sekarang mendapatkan perlawanan dari masyarakat Lunjen. Konflik yang sudah berlangsung kurang lebih satu tahun, hingga sampai sekarang ini konflik penambangan marmer ini masih aktual karena sampai saat ini masyarakat yang memang tidak setuju tetap menolak rencana pembangunan PT Arung Bungin. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul PT Arung Bungin dan Konflik Sosial Budaya Pada Masyarakat Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

B. Pertimbangan Pemerintah Daerah untuk Menjadikan Desa Lunjen Sebagai Kawasan Pertambangan

Penelitian ini dilakukan di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, dengan sasaran penelitian adalah masyarakat lunjen terhadap pemerintah terkait pembangunan PT Arung Bungin. Pertimbangan memilih lokasi penelitian adalah karena di sana dapat dengan mudah mendapatkan narasumber yang dapat memberikan informasi mengenai konflik yang terjadi terkait pembangunan PT Arung Bungin, serta alasan praktis sebagai sarana

pedidikan peneliti terkait konflik pembangunan PT Arung Bungin, sehingga memberikan keleluasaan dalam melakukan penelitian.

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Observasi (*observation*). Observasi merupakan suatu metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kegiatan penelitian ilmiah pada mulanya diarahkan kepada usaha untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan mengenai lingkungan alam manusia. (Zuriah, 2006) (2) Wawancara (*interview*). Metode wawancara atau metode *interview*, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. (Zuriah, 2006) (3) Dokumentasi (*documentation*). Menurut Bungin, teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Cara mengumpulkan data melalui dokumentasi yaitu melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, serta dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Imam, 2013)

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu: (1) Reduksi data

(*data reduction*), yakni kegiatan yang merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. (2) Penyajian data (*data display*), yakni dibuat dengan maksud untuk memudahkan melihat gambaran hasil penelitian secara keseluruhan, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. (3) Kesimpulan dan verifikasi (*drawing and verifying conclusion*), yakni penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan itu ditarik dari data yang telah direduksi dan disajikan. (Imam, 2013)

Pertimbangan pemerintah daerah untuk menjadikan Desa Lunjen sebagai kawasan pertambangan, Dilihat dari keadaan geografis Kecamatan Buntu Batu merupakan salah satu titik tambang yang menggiurkan pemodal untuk membuka pertambangan, kecamatan Buntu Batu merupakan Kecamatan yang memiliki potensi sumber daya alam terbesar di kabupaten Enrekang. Terutama karena pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu itu sendiri tergolong ke dalam Desa Swadaya, dimana salah satu ciri-ciri Desa Swadaya yaitu daerahnya berupa pengunungan dan perbukitan, dan lokasinya terpencil. Sehingga jika dilihat berdasarkan dari ciri-ciri tersebut Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu memang sangat cocok dijadikan lokasi pertambangan karena daerahnya yang tergolong terpencil dan jauh dari Ibukota Kabupaten.

Sebelum pemerintah daerah memberikan izin ke perusahaan tambang untuk melakukan pertambangan di lokasi

tersebut pemerintah daerah memang sudah melakukan penelitian lebih awal dan lokasi tersebut sangat layak untuk dijadikan sebagai lokasi pertambangan karena potensi sumber daya alam ada pada lokasi tersebut dan bahan baku untuk marmer ada pada lokasi tambang bahkan masuk dalam kategori berkualitas nomor satu sehingga sangat layak dan tidak dekat dengan pemukiman warga.

Di sisi lain, salah satu landasan kuat pemerintah daerah berani mengeluarkan rekomendasi penambangan kepada pihak penambang untuk melakukan eksplorasi tambang di lokasi tersebut karena faktor ekonomi dan lapangan kerja. Dimana hadirnya perusahaan tambang tersebut dapat membantu peningkatan asli daerah dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Setelah pemerintah daerah melakukan penelitian awal mengenai pemilihan lokasi tambang marmer tersebut selain dari sumber daya alamnya yang kualitasnya tinggi, pemerintah daerah juga mempertimbangkan dampak terhadap Situs sejarah yang masyarakat anggap rusak jika pertambangan akan dilanjutkan, situs sejarah yang dimaksud yaitu Bekas Tapak Tangan, Searambi Mayat, Bekas Salassa Puang Talise, dan Kuburan Raja-Raja Duri. Hasil penelitian dari tim teknis dinas keurbakalaan provinsi dan Dinas lingkungan hidup menuturkan bahwa lokasi situs sejarah dengan lokasi yang akan tambang terbilang jauh dan tidak akan terganggu. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pembahasan mengenai situs sejarah tidak ada pada awal-awal perusahaan masuk melainkan pada saat perusahaan mulai akan beroperasi. (Esteves et al., 2012; Risal et al., 2017; YUNianto, 2014; Zaki, 2013)

Hasil dari wawancara pihak masyarakat yang setuju dengan tambang sekaligus pemilik lahan yang ada di sekitar tambang yang mengatakan bahwa tidak sedikit pun pemaksaan dari pihak perusahaan terhadap kami. Ada Alasan sehingga memberikan lahan untuk dijadikan jalanan menuju lokasi tambang kepada pihak perusahaan karena prioritas pertama kami untuk kenyamanan bersama apabila jalanan itu sudah bisa dilewati, yang dulunya hanya bisa jalan kaki menuju kebun tapi sekarang setelah pihak perusahaan melakukan pekerjaan jalanan masyarakat pun bisa ke kebun dengan berkendara motor. Selain dijadikan sebagai jalan tani juga dijadikan jalan menuju ke wisata yang ada di Buntu Batu. Kesalahpahaman Masyarakat penolak tentang lokasi tambang yang katanya Buntu Batu akan hancur tetapi jarak Buntu Batu dengan lokasi tambang yaitu Mamma Allo terhitung jauh. Mengenai makam raja-raja duri dengan tapak tangan itu tidak akan terganggu karena makam raja-raja duri adalah makam nenek moyang saya dan Tanah yang ada di lokasi sekitar tambang tersebut keluarga besar kami sepupu dan saudara dan mereka semua tidak merasa keberatan dengan tambang tersebut.

C. Popularitas Latar Belakang Terjadinya Konflik PT Arung Bungin di Desa Lunjen

Konflik PT Arung Bungin yang terjadi di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu yang terjadi sejak awal tahun 2016 hingga sampai sekarang berawal dari kehadiran salah satu perusahaan yaitu PT Arung Bungin yang ingin melakukan eksplorasi tambang marmer di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang tepatnya di Desa Lunjen. Masyarakat Lunjen mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada sosialisasi awal kepada

masyarakat Lunjen dari pihak tambang maupun pihak pemerintah daerah terkait pembangunan perusahaan tambang marmer tersebut. Awalnya pada saat pihak tambang dan pihak pemerintah daerah datang melakukan aktifitas di lokasi pertambangan masyarakat Lunjen mengira bahwa kegiatan yang dilakukan hanya sekedar penelitian biasa tentang jenis-jenis batuan yang ada di Kecamatan Buntu Batu sehingga sebelumnya masyarakat Lunjen tidak langsung melakukan protes, hingga ketika pihak penambang mulai membawa alat-alat berat ke lokasi tambang, masyarakat Lunjen baru mengetahui hal tersebut bahwa Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu akan di jadikan sebagai lokasi pertambangan marmer yang bernama PT Arung Bungin.

Setelah masyarakat telusuri lebih lanjut, eksplorasi tambang yang hendak dilakukan oleh pihak penambang ternyata telah mendapatkan izin Usaha Pertambangan pada tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis-Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2K) melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan dengan Nomor: 0315/P2T-BKM/9.29.P/VII/09/2015.(Abdoellah, 2016) SK ini dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, dimana Dinas PTSP Kabupaten Enrekang mengeluarkan data tertulis berdasarkan data-data yang telah dirangkum dari beberapa dinas yang terkait yaitu Dinas Energi dan pertambangan Kabupaten Enrekang, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parawisata Kabuapten Enrekang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, dan Dinas PERKIM-TR Kabupaten Enrekang. Sehingga Pemerintah Daerah yang terkait beranggapan bahwa semua berkas-berkas yang dibutuhkan pihak perusahaan tambang

untuk mendapatkan izin telah dilengkapi, sehingga pemerintah daerah memutuskan untuk mengeluarkan rekomendasi ke pemerintah provinsi untuk selanjutnya ditindak lanjuti sehingga keluar SK Gubernur.

Masyarakat Lunjen menganggap bahwa masuknya PT Arung Bungin di wilayah Desa Lunjen untuk melakukan tambang dengan alasan adanya surat izin untuk melakukan pertambangan dari Provinsi ternyata tidak sesuai prosedur aturan yang berlaku. Kehadiran tambang tersebut juga secara tiba-tiba tanpa adanya kegiatan-kegiatan sesuai prosedur seperti sosialisasi dan penjelasan tentang dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat menilai bahwa pengeluaran izin pertambangan PT Arung Bungin tidak dilakukan secara terbuka melainkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Masyarakat beranggapan bahwa kehadiran salah satu perusahaan swasta yaitu PT Arung Bungin akan mengganggu situs sejarah yang dianggap suci dan terjadinya pencemaran lingkungan hidup masyarakat yang nantinya akan membawa dampak terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di lingkaran lokasi tambang. Di sisi lain, salah satu ciri utama desa adalah mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian maka dari itu masyarakat khawatir apabila pembangunan pertambangan tersebut dibangun maka lahan perkebunan akan tercemari yang sebelumnya subur menjadi tidak subur. Sehingga masyarakat Lunjen berusaha untuk menolak perusahaan tambang tersebut dengan melakukan perlawanan dalam bentuk aksi penolakan seperti melakukan demonstrasi di kantor-kantor pemerintah daerah terkait, pemasangan baliho sepanjang jalan Desa Lunjen yang tertuliskan penolakan tambang. Masyarakat melakukan aksi demosntrasi

pertama kali di Kantor Camat Buntu Batu karena masyarakat menganggap bahwa pihak Kecamatan bekerja sama dengan pihak perusahaan dalam melancarkan rencana pertambangan marmer tersebut kemudian aksi susulan dilanjutkan di kantor-kantor pemerintah yang terkait seperti kantor Bupati.

Adapun tujuan dari aksi demonstri yang dilakukan oleh aliansi yaitu menuntut izin pertambangan segera di cabut tetapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai mendapatkan respon seperti yang diinginkan aliansi. Sedangkan pengrusakan alat berat milik perusahaan berimbas terhadap perusahaan tambang karena perusahaan belum beroperasi tapi alat kerja perusahaan sudah dirusaki oleh masyarakat sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian. Akhirnya sampai sekarang belum ada titik temu yang didapatkan dari konflik. Masyarakat beranggapan bahwa masyarakat dengan tegas menolak dengan adanya tambang marmer tersebut. Masyarakat menganggap bahwa banyak alasan yang kita pertimbangkan mulai dari dampak-dampak lingkungan yang diperkirakan akan terjadi contohnya pencemaran air, pencemaran udara, dan dampak terhadap situs sejarah. Masyarakat yang menolak tambang tersebut menjelaskan bahwa dampak buruk yang sudah kelihatan dengan tambang ini yaitu jalanan yang dilewati ekskavator dan mobil besar sudah nampak rusak, selaian dari itu masyarakat juga mengkhawatirkan lahan perkebunan yang ada di sekitaran tambang apabila tambang marmer ini lanjut beroperasi lahan masyarakat akan tercemari dengan debu-debu pabrik sehingga lahan yang dulunya subur mejadi tidak subur mengingat mata pencaharian masyarakat Desa mayoritas petani. Maka alasan penolakan yang dilakukan masyarakat

semakin memperkuat masyarakat menolak tambang marmer untuk lanjut beroperasi.

D. Pertimbangan Dampak Sosial Budaya Akibat Adanya Konflik Pembangunan PT Arung Bungin

Dampak sosial budaya akibat adanya konflik pembangunan perusahaan tambang PT Arung Bungin di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu berdampak pada hubungan sosial budaya masyarakat di sekitaran lokasi pertambangan. Masyarakat Desa Lunjen seperti halnya masyarakat Desa pada umumnya yang ada di Kabupaten Enrekang masih memegang teguh Budaya TOBANA (Tolong menolong bantu membantu nasehat menasehati). Akibat adanya pembangunan tambang yang dilakukan PT Arung Bungin Budaya TOBANA di sebagian masyarakat Lunjen mulai nampak renggang antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, timbulnya komunikasi yang tidak baik dalam hal berbicara, timbulnya sikap keegoisan dalam hal mementingkan diri sendiri, berkurangnya sikap kekeluargaan dan sikap gotong royong yang merupakan cerminan dari nilai budaya kebersamaan. Dimana diketahui bahwa di masyarakat desa mempunyai hubungan kekeluargaan yang masih erat dibandingkan dengan masyarakat kota. Di masyarakat Lunjen Kecamatan Buntu Batu masih memegang erat ikatan persaudaraannya.

Hasil wawancara masyarakat penolak dengan tambang yang mengatakan bahwa dengan adanya konflik yang terjadi sangat membawa dampak buruk bagi masyarakat yang dulunya hubungan tetap terjalin baik antara satu dengan lainnya menjadi renggang, kekeluargaan dan komunikasi otomatis sudah berbeda dengan sebelumnya. Dampak buruk yang ditimbulkan seperti sikap keegoisan sudah ada pada diri masing-

masing. Masyarakat yang tidak setuju dengan tambang tersebut mengatakan kalau masyarakat yang menolak tidak akan mau apabila kampung mereka dirusaki hanya karena beberapa alasan apalagi lokasi yang mau ditambang itu merupakan lambang dari nama Buntu Batu.

Dilihat dari hasil wawancara masyarakat penolak dengan masyarakat setuju dengan tambang sangat berbeda pendapat. Masyarakat yang setuju dengan tambang menganggap bahwa hubungan kekeluargaan dan komunikasi terhadap penolak tetap kami jaga, meskipun masyarakat penolak melakukan penolakan dengan berbagai cara tetapi masyarakat mendukung tambang tetap menjaga hubungan baik tanpa ada langkah-langkah perlawanan terhadap masyarakat penolak.

Sampai sekarang pihak perusahaan belum sempat melakukan produksi namun, mereka tetap mendirikan basecamp di lokasi penambangan, dengan alasan mereka akan menunggu masyarakat untuk mengalah agar kegiatan pertambangan bisa beroperasi kembali. Pihak perusahaan pun mengaku tidak akan melanjutkan operasi karena mereka ingin mencari jalan terbaik karena kami menganggap bahwa kita ini sama-sama masyarakat Buntu Batu mau dikemanakan hubungan kekeluargaan jadi sampai sekarang kami tetap mengalah sampai masyarakat penolak sudah tidak melakukan penolakan. Tetapi jika penolakan akan tetap berlanjut, pihak perusahaan bisa saja akan mundur dan tidak akan lagi melanjutkan pertambangan dengan syarat mengganti semua kerugian perusahaan karena perusahaan tidak akan berani melakukan kegiatan tanpa ada izin dari Negara.

E. Penutup

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana yang

telah disajikan pada bab sebelumnya terdapat dua kesimpulan yaitu ; Pertimbangan pemerintah daerah untuk menjadikan Desa Lunjen sebagai kawasan pertambangan, landasan kuat pemerintah daerah terkait pemilihan lokasi dikarenakan beberapa faktor yaitu potensi sumber daya alam ada pada lokasi tersebut dan bahan baku untuk marmer ada pada lokasi tambang bahkan masuk dalam kategori berkualitas nomor satu sehingga sangat layak dan tidak dekat dengan pemukiman warga, di lain sisi dampak ekonomi yang akan membantu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang meningkat dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal berhubung sekarang ini banyak anak muda yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran.

Latar belakang terjadinya konflik PT Arung Bungin di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu, pemicu terjadinya konflik di Desa Lunjen karena Masyarakat Lunjen menganggap bahwa masuknya PT Arung Bungin di wilayah Desa Lunjen untuk melakukan tambang dengan alasan adanya surat izin untuk melakukan pertambangan dari Provinsi ternyata tidak sesuai prosedur aturan yang berlaku kemudian masyarakat juga merasa tidak di hargai sebab Kehadiran tambang tersebut juga secara tiba-tiba tanpa adanya kegiatan-kegiatan sesuai prosedur seperti sosialisasi dan penjelasan tentang dampak yang akan di timbulkan sehingga masyarakat menilai bahwa pengeluaran izin pertambangan PT Arung Bungin tidak dilakukan secara terbuka melainkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dampak sosial budaya akibat adanya konflik pembangunan PT Arung Bungin di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu, Masyarakat Desa Lunjen seperti halnya masyarakat Desa pada umumnya yang ada di Kabupaten Enrekang masih memegang teguh Budaya TOBANA (Tolong menolong bantu

membantu nasehat menasehati). Akibat adanya pembangunan tambang yang dilakukan PT Arung Bungin yang menjadi pemicu timbulnya konflik di masyarakat Lunjen sehingga Budaya TOBANA di sebagian masyarakat Lunjen mulai nampak renggang antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, timbulnya komunikasi yang tidak baik, timbulnya sikap keegoisan, berkurangnya sikap kekeluargaan dan sikap gotong royong yang merupakan cerminan dari nilai budaya kebersamaan.

Referensi

- Abdoellah, O.S., 2016. Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan. Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmadin, A., n.d. Masalah Agraria di Indonesia Masa Kolonial. Attoriolong" Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan" 4, Januari-Juni.
- Belanda, M., Jepang, d., Islam, j.s.d.p., Djati, s.g., n.d. Perkembangan UU Agraria dan Kebijakan-Kebijakan.
- Esteves, A.M., Franks, D., Vanclay, F., 2012. Social impact assessment: the state of the art. *Impact Assessment and Project Appraisal* 30, 34-42.
- Imam, G., 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nalle, V.I.W., 2012. Hak menguasai negara atas mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi* 9, 473-494.
- Pelzer, K.J., 1957. The agrarian conflict in East Sumatra. *Pacific Affairs* 151-159.
- Rahman, A., n.d. Sinergitas Teknologi Moderen dan Kearifan Lokal Dalam Pengolahan Lahan di Desa Bulu Lue.
- Risal, S., Paranoan, D.B., Djaja, S., 2017. Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrative Reform (JAR)* 1, 516-530.
- Yunianto, B., 2014. Analisis dampak kebijakan nilai tambah mineral Indonesia terhadap ekspor dan ketenagakerjaan. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 10, 127-141.
- Zaki, A.R., 2013. Dampak Sosial Ekonomi Pertambangan Minyak Dan Gas Banyu Urip Kabupaten Bojonegoro (Studi pada Masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik* 1, 125-131.
- Zuber, A., 2016. Konflik Agraria Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, 147-158.
- Zuriah, N., 2006. Metodologi penelitian sosial dan pendidikan: teori, aplikasi. Bumi Aksara.